

PENDIDIKAN UNTUK SEMUA ORANG

Maryono²⁵

Abstrak. Sesungguhnya pendidikan itu hak dan milik setiap orang. Hak yang harus dipunyai oleh siapa saja dan dimana saja. Sehingga siapapun dan dimanapun berhak untuk dididik. Disitulah pendidikan disebut sebagai bagian budaya; bagian yang multikultur. Yang berhak dididik dan mendidik adalah, manusia yang memiliki kebudayaan. Lembaga pendidikan diselenggarakan untuk pemenuhan kebutuhan sesuai dengan keadaan. Hal itu sesuai dengan tujuan pendidikan dimana setiap produk pendidikan harus menghasilkan *how to learn, how to know, how to do, how to live together* seperti yang direkomendasi UNESCO. Pendidikan seharusnya diselenggarakan secara beragam jauh dari keberaman. Pendidikan tidak harus menerima mereka yang ingin belajar. Terdapat kekeliruan bahwa mayoritas mengalahkan minoritas Pendidikan harus plural baik peserta didik, pendidik maupun lembaganya.

Kata Kunci: pendidikan

PENDAHULUAN

Berbahagiaalah bangsa yang dianugerahi kemajemukan, keragaman, kebhinekaan, plural. Dari anugerah itulah diharapkan akan terjadi sinergi, simponi yang indah, menarik, yang melahirkan budaya holobis kuntul baris (Jawa), handep (Kalteng), pela (Maluku), mapalus (Minahasa), liliuran (Sunda), ngendeng (Bali). Indonesia memiliki ratusan etnik dan karya budaya nusantara sebagai wujud anekabudaya, multikultur. Ragam etnik dengan ragam budaya dan agama, kepercayaan sebagai subkultur, mengkristal dalam hegemoni kelompok. Multikultur merupakan suatu wacana empirik yang menggambarkan adanya keragaman, bukan keseragaman, pengetahuan, pemikiran, persepsi dan sikap serta aktivitas subyek atau sekelompok subyek. Multikultur merambah keseluruhan medan masyarakat, termasuk medan pendidikan khususnya pendidikan formal tingkat dasar dan menengah. Masalah kultur adalah masalah manusia, masalah peradaban anak cucu Adam dulu, kini dan mendatang.

Dunia pendidikan adalah salahsatu bentuk peradaban, bentuk budaya. Keragaman dalam khasanah pendidikan menimbulkan ambivalensi. Disatu sisi keragaman dipandang sebagai cerminan manusiawi yang harus diberdayakan, pada sisi lain keragaman akan memperlumah arus dinamika intra, dan antar kelompok. Ambivalensi dapat bernuansa mimikri yang oleh Homi K.Bhaba digambarkan sebagai suatu sikap dinama di satu pihak

²⁵ Profesor Prodi PLS FKIP Universitas Jember

perlu dibangun identitas dan persamaan, tetapi dipihak lain juga mempertahankan perbedaan (Homi K.Bhaba, 1994).

Keragaman melahirkan hegemoni, melahirkan kelompok luar bagi yang tidak seragam. Dalam dunia pendidikan modern, paradigma kontemporer, keragaman, kemajemukan justru perlu ditumbuh kembangkan. Paradigma keragaman, multikultur lebih manusiawi. Dalam strategi pendidikan keragaman lebih dekat kepada ranah konstruktivistik (Nyoman.S Degeng, 2001). Multikultur dalam dunia pendidikan tergambar dalam sosok ragam siswa, baik etnik, agama, potensi intelektual, latar belakang dan latar depan sosial serta status orang tua. Walau Undang-undang No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (sedang dalam penyempurnaan) telah menjamin adanya keragaman sekaligus keseragaman, tetapi pada kenyataannya tidak sedikit ditemukan keragaman semu diterapkan didunia pendidikan. Betapa tidak banyaknya siswa yang beragam (agama, etnis, sosial ekonomi) berada di sekolah yang tampak permukaan diklaim seragam. Akibat yang muncul adalah disharmonisasi, perbedaan perlakuan, yang kesemuanya merupakan benih konflik ibarat bola salju yang jelas tidak menguntungkan. Atmosfir lembaga pendidikan kian memanas, lembaga pendidikan sudah bukan tempat yang nyaman lagi untuk pemberdayaan potensi diri. Beberapa perilaku yang tak terpuji kian mewabah antara lain kejadian siswa membolos, tawur antar siswa-antar sekolah, pengeroyokan dan penganiayaan terhadap guru dan perilaku menyimpang lain. Hal tersebut baru merupakan citra dampak negatif dari keseragaman, monokultur, hegemoni kelompok tertentu.

Mengapa dunia pendidikan yang multikultur melahirkan atmosfer dan citra negatif yang memudarkan wajah pendidikan di zaman modern ini? Multikultur dalam pendidikan harus disikapi secara rasional bukan dengan emosional, bahwa keberadaannya merupakan kodrati, natural tidak bisa dihindari. Perspektif multikultur sebagai kendala dinamika kelompok perlu diluruskan salah satunya dengan menggunakan paradigma pendidikan, dan paradigma komunikasi. Paradigma pendidikan akan mengantarkan pada filosofi tujuan dan hakekat, siapa peserta atau pelaku dan dengan apa pendidikan diraih, dengan lebih mengedepankan aspek budaya. Paradigma komunikasi menuntun bagaimana seharusnya berinteraksi dalam keragaman, sebagai sarana menemukan simpul ragam dalam keragaman.

Urgensi pendidikan dalam arti luas demikian strategis bagi masyarakat dan kebudayaan. Kebudayaan merupakan elan vital masyarakat. Pendidikan kebudayaan masyarakat, merupakan tiga pilar bagi peningkatan kehidupan masyarakat, peningkatan keberadaban masyarakat. Akan tetapi secara epistemologis ketiga pilar tersebut baru sebatas wacana meramaikan eforia reformasi dan globalisasi. Salah satu bukti hal tersebut adalah belum membuminya wacana pendidikan yang multikultur sebagaimana diilustrasikan di atas.

Lembaga pendidikan (baca sekolah) diselenggarakan untuk peningkatan kehidupan masyarakat sesuai dengan nilai kemajuan dan keadaban (*civility*), sehingga tercipta masyarakat yang berperadaban (*civilize culture society*). Terbius oleh kompetisi global, laju pendidikan diarahkan ke arah peningkatan daya saing otak melalui strategi pembelajaran bukan strategi belajar. Strategi tersebut diwarnai dengan pacuan memperoleh NEM (nilai ebtanas murni) setinggi mungkin, walau kecerdasan intelektual hanya berkontribusi 20% dalam meraih sukses. Pendidikan disekolah lebih tertuju untuk mempertajam kemampuan kognitif, dengan dalih untuk memasuki arena kompetisi dan komparasi dalam dunia pendidikan lanjut dan dunia kerja. Walaupun hal tersebut merupakan amputasi dari makna pendidikan. Namun katub strategi tersebut akan menjadi potensial manakala ranah selain kognitif yakni afektif dan psikomotorik tidak diabaikan. Masyarakat disekolah dipandang sebagai *school society* yang saling memiliki andil, bukan hanya dipandang sebagai *group society*. Dampak negatif dari kekhilafan atau amputasi strategi tersebut adalah penumpukan afektif, rendahnya sikap toleransi, kebersamaan, kesadaran dan kesetiaan meyakini dan menerima adanya perbedaan. Hal demikian oleh Gardner disinyalir bahwa kecerdasan intrapersonal jauh tertinggal daripada kecerdasan intelektual (Indrajati, 2001). Strategi pembelajaran yang cukup lama dipraktikkan berdimensi behavioristik konvensional, karena dianggap telah mapan dalam kondisi keseragaman, dimana keragaman, kreativitas sebagai ciri konstruksionis justru di jauhi (S. Degeng, 2001). Pola pendidikan konservatif yang menabukan keragaman terperosok kedalam jalur fundamentalis, lambat untuk berkembang, karena memasukkan hegemoni kekuasaan yang eksklusif bagi sejumlah orang, harus segera digeser ke arah keragaman, liberasionisme pendidikan (Neil, 2001). Salahsatu ciri liberasionisme

pendidikan adalah digunakannya landasan sosial kedirian (*selfhave*) dan menekankan manusia sebagai bentuk keluaran budaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merujuk pada empat pilar pendidikan dari UNESCO yakni *learning to know*, *learning to do*, *learning to live together* dan *learning to be*, maka pilar ke tiga menjadi demikian penting agar hakekat pendidikan untuk semua orang lebih tertanam kokoh ditengah hiruk pikuknya persaingan. Prinsip belajar untuk hidup bersama berarti menempatkan manusia dalam kesadaran bahwa jati dirinya harus dapat hidup dalam keragaman berbagai pandangan hidup, budaya, agama, kepercayaan dsb. Dunia akan menjadi “*global village*” dimana setiap orang dapat berperan dan diperankan (Marsetio, 2001). Pluralitas harus dimaknai sebagai suatu berkah, keragaman harus menumbuhkan saling tergantung dan saling terkait. Belajar untuk dapat hidup bersama dalam keragaman perlu ditanamkan sejak dari keluarga, di sekolah dan melebar di masyarakat. Jika pendidikan dianggap sebagai produk budaya sekaligus sebagai wahana pemberdayaan manusia, asas keragaman harus diterima dengan sepenuh hati. Lemahnya pendidikan sebagai pranata sosial dapat dibangkitkan dengan penanam nilai kebudayaan secara *acquiring* melalui *inquiry* (Tilaar, 2000).

Dimensi sejarah, politik dan ekonomi dapat digunakan untuk mencari tahu terjadinya pemudaran hakekat dunia pendidikan dalam keragaman. Ragam etnik, agama, budaya yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata merupakan menu yang menggiurkan bagi pemerintah kolonial Belanda untuk memperkokoh koloninya melalui *divide et impera* dan politik balas budi versi penjajah. Penjajahan yang ratusan tahun nyaris menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang beradab. Keragaman tidak untuk membangun sinergi, justru digesekkan agar meletus konflik, permusuhan. Penajaman strata masyarakat atas dasar ekonomi, etik, agama dalam *patroon client* saat itu hingga kini masih membekas. Perasaan sebagai turunan bangsa terindas masih melekat, melahirkan wacana “etno nasionalisme” yakni kesadaran membangun konsep bangsa berdasar sentimen agama dan ras. Kebangsaan tidak menghadirkan kesadaran untuk melupakan perbedaan, akhirnya muncul interaksi reduksionis dalam berbagai bidang ekonomi, sosio kultural (Dahlan, 2001). Kepentingan bangsa didominasi oleh segelintir

elit, sekelompok etnik, akibat yang terjadi adalah kecemburuan sosial yang diekspresikan sentimen vertikal. Kelompok yang termajinalkan diposisikan sebagai perancu, bukan penyeimbang. Dalam dunia pendidikanpun tidak luput dari krisis tersebut. Pendidikan yang seharusnya merupakan wahana pembebasan manusia dari berbagai penindasan, sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak harus mempresentasikan kekuatan sosial politik penguasa atau untuk menjaga status quo, tetapi harus berani keluar dari tirani penguasa. Sekolah harus membangkitkan kesadaran bahwa manusia memiliki hak asasi, demikian “*paedagogy of freedom*”nya Paulo Frairre (Tilaar, 2001).

Kini krisis global melahirkan ilusi bahwa manusia dilahirkan untuk *how to get*, memenuhi kebutuhan biologis, hedonis, melahirkan konsumerisme. Pendidikan kurang menyentuh ranah afektif. Masyarakat bukan belajar, mengembangkan diri, tetapi sekedar menikmati, mengkonsumsi, yang demikian sebenarnya adalah pembodohan masyarakat (I. Ilich 2001). Karena terbalut kepentingan materi dan posisi akhirnya memunculkan kecemburuan, prasangka sebagai benih konflik.

Ragam etnik dalam suatu bangsa selalu ada, sehingga oleh Erikson yang demikian memunculkan bentuk-bentuk etnik berdasar cluster (desa-kota), asli - pendatang dll. Kelompok etnik dalam masyarakat plural cenderung melahirkan pemujaan terhadap kelompok etnik (*idols of tribe*) yang oleh H.R Isacs sebagai bentuk krisis budaya (Dahlan, 2001). Hal serupa seperti dikemukakan D.L Harickson sebagai “*illusory correlation*” yakni kesalahan mayoritas dalam melihat minoritas.

Demensi lain untuk melihat ragam masyarakat plural adalah dengan melihat kultur subyektip. Triandis memberikan pengertian kultur subyektip adalah cara khas suatu komunitas kultur dalam memandang lingkungannya. Cara pandang atau persepsi tentang nilai, aturan, peran adalah aspek kultur subyektip, disamping sikap, stereotip, harapan dan norma, idealisme (Warmen, 2002). Ragam kultur subyektip didorong oleh *idols of tribe*, ditambah kurang atau kesalahan komunikasi akan memicu konflik, agresivitas kelompok. Dalam bidang pendidikan kesenjangan dapat berada didalam maupun antar sekolah (intra-antar), yang bersifat vertikal maupun horisontal. Pendidikan multikultur atau pendidikan keragaman tidak lepas dari stigma tersebut. Upaya untuk menghindari akan terkendala oleh: a) kendala psikologis b) kendala fisik. c) kendala sosiologis d) kendala ekonomis dan e) kendala komunikasi. Kendala psikologis karena

telah muncul persepsi stereotip etnis yang cenderung permanen. Perbedaan perilaku, kebiasaan adalah tampilan fisik sebagai kendala fisik dan perilaku, potensi dan posisi dalam masyarakat, perekonomian adalah keadaan sosial ekonomi yang beragam. Bahasa merupakan sarana baku dalam komunikasi, yang ragamnya lebih banyak dibanding dengan ragam lain. Ragam bahasa dapat merupakan kendala jika tidak dikuasai. Komunikasi merupakan bagian vital bagi manusia bahkan untuk binatang. Lewat komunikasi manusia berbudaya dan bahasa merupakan bagian budaya. Dari bentuk dan cara berkomunikasi dapat dinilai kadar budaya suatu masyarakat. Lewat komunikasi pula masyarakat dapat ditata atau sebaliknya. Atas dasar itulah kesenjangan pendidikan multikultur dicoba dirunut untuk dicarikan solusinya, melalui komunikasi dalam pendidikan, karena kesenjangan komunikasi patut diduga sebagai akar masalahnya. Mengajarkan cara berkomunikasi yang tepat adalah bagian dari strategi pendidikan kepada masyarakat yang beragam.

Kesenjangan pendidikan yang pluralis patut diduga bersumber dari kesenjangan komunikasi pendidikan. Komunikasi pendidikan merupakan cara penyampaian dan menerima informasi yang baik kepada peserta didik. Dalam kegiatan berkomunikasi akan terlibat beberapa unsur yakni pesan atau informasi yang disampaikan, penyampai dan penerima serta tujuan, dilengkapi dengan balikan (*feedback*). Kesenjangan dapat terjadi pada substansi atau unsur dapat pula terjadi karena frekuensi atau intensitasnya. Melalui komunikasi pendidikan akan terbuka cakrawala bahwa keragaman adalah suatu berkat bukan laknat. Mengajarkan bagaimana belajar memahami dan memberdayakan keragaman merupakan implementasi komunikasi pendidikan. Pendidikan harus selalu mengkomunikasikan khittah manusia yang berbudaya bukan sebaliknya. Jika pesan dalam komunikasi sebagai acuan, maka pematangan ranah kognitif bukan hanya sekedar tahu, tetapi sampai analisa dan aplikasi tentang keragaman. Ranah afektif berkaitan dengan emosi, sikap, dapat dipertajam lewat komunikasi sehingga sikap kemauan untuk menerima, tekun dan teliti dalam bertindak berdasar penilaian yang rasional obyektif selalu digunakan dalam pengambilan keputusan.

Pendekatan melalui pendidikan mencakup sosialisasi dan transformasi nilai-nilai antar generasi, yang harus dilaksanakan secara sadar dan terus menerus. Perlu dibangunnya *ethno paedagogy* sebagai ciri khas pendidikan nusantara agar tidak terkikis

oleh budaya global yang tidak semuanya cocok bagi budaya nusantara. Ajaran hemat, menghargai orang lain, bekerjasama, adalah sebagian contoh pesan dalam *ethno paedagogy*, dimaksudkan agar peserta didik lebih produktif dilingkungannya.

Dampak pluralistik dalam pendidikan tidak lepas dari imbas mengentalnya prasangka (*prejudice*) antar kultur, ras, agama, strata. Prasangka muncul karena penangkapan dan penafsiran tampilan dari setiap produk kultur, dan agama sebatas substansi atau bagian, bukan keseluruhan utuh atau esensi. Terlebih lagi cara menangkap sebatas menggunakan emosi bukan menggunakan rasio, kesimpulan yang didapatpun berdasar subyektivitas emosional. Alat ukur yang digunakan untuk menera sikap atau perilaku kelompok atau budaya luar adalah norma sefihak, gaya selingkung (*house style*), yang belum tentu valid dan reliabel. Imbang dan adil akan terjadi dalam menimbang dan mengukur sikap dan perilaku luar yang plural jika yang diukur adalah esensi bukan hanya yang tampak sesaat. Sebagai contoh kecil tampilan etnis Jawa yang dinilai adem mayem, etnis Madura dan Batak yang terkesan kasar, etnis Cina yang dikaitkan dengan judi dan bisnis, jika dipakai sebagai alat generalisasi dan pembenaran akan menuai banyak bias. Bias prejudice Jawa adem ayem sebagai anomali etos semangat, lincah dan produktif, bias prejudice Batak dan Madura bertentangan dengan kesopanan dan etika, bias prejudice Tionghoa kesulitan untuk pembauran dan moralitas religius, dan lain-lain. Beberapa bias terakumulasi dalam kurun lama, klimaknya sekat - sekat keragaman dalam perseptif negatip semakin tampak, sewaktu waktu akan digunakan sebagai dalih untuk pertahanan diri dan kelompoknya karena merasa adanya ancaman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Persimpangan jalan dalam prularistik ditandai oleh tidak atau belum mau menerimanya keragaman, dapat dieliminir melalui pendekatan komunikasi pendidikan. Komunikasi mengajarkan bagaimana berinteraksi dalam keragaman. Pendidikan mengajak setiap peserta dan pelaku serta masyarakat kembali kehati diri sebagai manusia yang berpotensi untuk berdaya secara individu maupun secara kelompok. Budaya harus diajarkan sebagai *cultural goods*, sebagai realisasi sistem nilai atau hasil perilaku dalam matra luas. Kaluasan matra karena budaya mencakup realisasi nilai ekonomi (*economic goods*), nilai kebenaran dan teoritis (*theoretical goods*), nilai kebijakan dan kekuatan

(*polithical goods*), nilai hubungan dan kerja sama (*solidarity goods*), nilai keindahan dan estetika (*aesthetical goods*) dan nilai keagamaan (*religijs goods*) (Lutan R. 2001). Apabila kini masyarakat pendidikan berada dipersimpangan jalan yakni tetap bertahan dan melanjutkan paradigma lama yang kontra produktif, atau menoleh dan menuju ke paradigma baru yakni pendidikan untuk semua orang yang manusiawi, beragam, maka pendekatan edukasi dan komunikasi sebagai alternatif solusi. Pendekatan edukasi harus berbasis makna budaya secara utuh, dengan penekanan pada makna pendidikan dan keteladanan. Pelaksanaan edukasi dalam semua lini mulai dari keluarga, sekolah dan masyarakat dilaksanakan bukan hanya diharapkan, karena ada saling ketergantungan (*interdependency*). Komunikasi harus dilaksanakan secara gradual dan berlangsung terus – menerus dalam semua kawasan pendidikan akan menajamkan ranah afeksi positif. Dampak teknologi komunikasi yang dapat mengeroposkan nilai budaya bahkan mempertajam nuansa sikap negatif antar ragam, dapat ditamengi dengan teknik berkomunikasi secara benar. Budaya komunikasi oral dan langsung (*face to face*) seperti bercerita sebelum tidur bagi anak-anak, merupakan budaya komunikasi tradisional yang masih perlu dipertahankan menyertai pemanfaatan teknologi komunikasi. Teknik komunikasi atau penuturan lisan lebih mempertajam efeksi karena kuatnya ikatan psikologis. Jalur untuk menuju kearah pendidikan yang lebih menjamin stabiitas dalam keragaman adalah mengajarkan, mengkomunikasikan dan memberikan keteladanan bagaimana menemukan simpul ragam dalam multi kultur. Sikap optimistis bahwa dalam keragaman pasti ada keseragaman, tinggal bagaimana cara menemukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhaba, Homi K. 1994. *The Location of Culture*. New York: Routledge
- Dahlan, M Muhidin. 2001. *Postkolonialisme; sikap terhadap Imperialisme*. Yogyakarta: Jendela
- Degeng, I Nyoman Sudana. 2001. *Formula Pendidikan Nasional Era Global*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Donosaputro, Marsetio. 2001. *Pengembangan Kurikulum Nasional dan Sistem Desentralisasi*. Malang: Universitas Negeri Malang

- Illich, Ivan. 2001. *Menggugat kaum kapitalis* (edisi Indonesia). Bandung: Melibas
- Lutan, Rusli. 2001. *Keniscayaan Pluralitas Budaya Daerah*. Bandung: Angkasa
- O' Neill, Willian F. 2001. *Idedologi-ideologi Pendidikan* (edisi Indonesia). Jakarta: Pustaka pelajar
- Sidi, Indra Jati. 2001. *Menuju Masyarakat Belajar*. Jakarta: Logos
- Tilaar, H A R. 2000. *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Warnaen, Suwarsih. 2002. *Streotip Etnis dalam masyarakat Multietnis*. Jakarta: Mata Bangsa.



